

# REVITALISASI TRADISI DAN POLITIK IDENTITAS: DIALEKTIKA KRISTIANITAS DI MALUKU

Steve Gerardo Christoffel Gaspersz,<sup>1</sup> Nancy Novitra Souisa<sup>2</sup>

Universitas Kristen Indonesia Maluku<sup>1,2</sup>

E-mail: [sgaspersz@yahoo.com](mailto:sgaspersz@yahoo.com),<sup>1</sup> [nsouisa@yahoo.com](mailto:nsouisa@yahoo.com)<sup>2</sup>

## Abstract

One indicator in examining religious dynamics is the formation of a religious institution and its existence in its history. This article attempts to analyze the historical dynamics of the establishment of the religious institution, namely the Protestant Church of Maluku (GPM) in the Maluku (Ambon) socio-cultural context. The scrutiny for exploring documents and constructing some interpretations of them is carried out using the social hermeneutic method to understand (*verstehen*) the dialectic between ideal principles through the internalization of Christian religious teachings and responses to various socio-cultural-political changes in the context in which it lives. The hermeneutic analysis is carried out to obtain a comprehensive understanding about the existence and religious orientation of the GPM, which is also influenced by the dialectic of encounters with various other identities.

**Keywords:** *identity politics, Christianity, tradition, modernity*

## Abstrak

Salah satu indikator dalam mencermati dinamika keagamaan adalah pembentukan suatu institusi keagamaan dan eksistensinya dalam perjalanan sejarahnya. Artikel ini berupaya mendedah dinamika sejarah pembentukan institusi keagamaan Gereja Protestan Maluku (GPM) dalam konteks sosial-budaya Maluku (Ambon). Penelusuran dokumen dan interpretasi terhadapnya dilakukan dengan metode hermeneutika sosial untuk memahami (*verstehen*) dialektika antara prinsip-prinsip ideal melalui internalisasi ajaran agama Kristen dan tanggapan terhadap berbagai perubahan sosial-budaya-politik dalam konteks yang dihidupinya. Analisis hermeneutik itu dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap eksistensi dan orientasi keberagamaan dari institusi GPM itu, yang turut dipengaruhi oleh dialektika pertemuan dengan berbagai identitas liyan.

**Kata Kunci:** *politik identitas, Kristianitas, tradisi, modernitas*

## PENDAHULUAN

Artikel ini membahas tentang konstruksi identitas agama dalam suatu konteks historis dan antropologis kepulauan di Maluku, timur Indonesia. Perkenalan dengan tradisi-tradisi keagamaan Islam di wilayah ini sudah berlangsung jauh sebelum abad ke-16 melalui interaksi dan jejaring perdagangan Nusantara. Kristianitas baru diperkenalkan kemudian bersamaan dengan masuknya pedagang-pedagang Portugis dan Belanda yang menciptakan suatu kultur persaingan ekonomi

perdagangan rempah-rempah yang bersifat monopolistik.<sup>1</sup>

Sejak abad ke-16 dan selanjutnya, konstruksi identitas agama di Maluku berkelindan kesadaran etnisitas budayawi yang erat terkait dengan ruang hidup dan kosmologi masyarakat kepulauan. Interaksi perdagangan dan jejaring perdagangan itu juga turut mendeterminasi terbentuknya komposisi demografi yang multibudaya sehingga menjadikan karakteristik sosial-

---

<sup>1</sup> Leonard Andaya, *The World of Maluku* (Honolulu: University of Hawaii, 1993), hlm. 144.

budaya masyarakat Maluku, terutama di Kota Ambon. Realitas sosial itu telah menghadapkan masyarakat pada potensi membangun peradaban yang majemuk dan dinamis, sekaligus menghadapkan pada tantangan konflik dan disintegrasi. Namun demikian, konteks multibudaya mendorong masyarakat menciptakan mekanisme budaya yang unik dan khas untuk tetap menjaga ekuilibrium sosial sehingga berjalan dinamis sembari menyiasati ruang-ruang pertemuan bersama agar tidak menimbulkan benturan yang destruktif.

Kendati telah mengalami pergeseran makna dan perubahan tindakan sosial dalam kurun waktu yang panjang sejak era kolonial hingga pascakolonial, namun struktur dasar kebudayaan yang terbentuk pada kenyataannya telah menguat menjadi modal sosial dalam interaksi multibudaya masyarakat Maluku. Ingatan bersama (*collective memory*) masyarakat Maluku sulit menghapus kenangan bagaimana pasca huru-hara 19 Januari 1999 muncul gerakan-gerakan perdamaian komunitas-komunitas Salam dan Sarane melalui acara *panas-pela* dan *panas-gandong* yang terutama sejak era pemerintahan Orde Baru (1966-1998) mengalami pergeseran pemaknaan secara signifikan.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Sumanto Al-Qurtuby, *Religious Violence and Conciliation in Indonesia: Christians and Muslims in the Moluccas* (New York: Routledge, 2016), hlm. 22-28.

Sejak saat itu sontak muncul semacam kesadaran budaya dan sejarah mengenai tradisi-tradisi lokal (adat) dan ikatan-ikatan sosial-budaya *pela* dan *gandong* yang selama ini sebenarnya telah dikenal sebagai modal sosial masyarakat Maluku. Dalam banyak anggapan orang, konflik Maluku telah mendorong suatu kebangkitan tradisi lokal yang kian tergerus oleh cara pandang dan gaya hidup modern-kapitalistik.<sup>3</sup>

Terhadap realitas sosial-budaya tersebut, kelompok agama-agama di Maluku membuka diri untuk mengapresiasi pendekatan-pendekatan budaya Salam-Sarane sebagai salah satu modal sosial penting yang mendorong gerak rekonsiliasi, terutama antara dua kelompok agama: Salam (Islam) dan Sarane (Kristen). Pihak pemerintah provinsi maupun nasional juga melihat pendekatan budaya Salam-Sarane dan/atau *pela-gandong* sebagai salah satu strategi yang dapat digunakan untuk memfasilitasi upaya-upaya membangun perdamaian dan stabilitas keamanan, baik di wilayah Maluku maupun berkontribusi bagi proses bina-damai di wilayah-wilayah lain Indonesia.<sup>4</sup>

Ulasan artikel membatasi lingkup penjelasannya hanya pada perspektif

---

<sup>3</sup> Jacky Manuputty dan Daniel Wattimanela, "Konflik Maluku" dalam Lambang Triyono dkk (eds.), *Potret Retak Nusantara: Studi Kasus Konflik di Indonesia* (Yogyakarta: CSPP UGM, 2004), hlm. 77-170.

<sup>4</sup> John Chr. Ruhullessin, *Etika Publik: Menggali dari Tradisi Pela di Maluku* (Salatiga: Satya Wacana Press, 2005), hlm. 85-100.

keagamaan Kristen dalam menelisik realitas sosial-budaya Maluku yang menjadi konteks hidup Kristianitas yang terlembagakan sebagai Gereja Protestan Maluku (GPM). Tujuannya adalah: (1) Mendeskripsikan realitas sosial-budaya dari masyarakat Maluku yang multibudaya yang mengalami dinamika sosial secara revolutif melalui pengalaman konflik sosial yang menarik dua komunitas berbeda agama (Islam dan Kristen) dalam pusaran arus konflik tersebut secara massif; (2) Menelisik pengalaman konflik sosial antara dua kelompok agama di Maluku sebagai ingatan bersama yang mendekonstruksi dan merekonstruksi pola-pola relasional keduanya secara dialektis sebagai bentuk-bentuk negosiasi budaya untuk meredam potensi konflik di masa depan.

## **METODE**

Ulasan artikel ini didasarkan pada deskripsi historis yang diinterpretasi secara kualitatif dalam bingkai analisis ingatan bersama (*collective memory*) dan antropologi agama secara interdisipliner. Data diperoleh secara acak dari berbagai literatur yang kemudian dirajut secara interpretatif dengan menggunakan analisis hermeneutika sosial. Hermeneutika sosial memperlakukan realitas historis dan sosiologis sebagai “teks” yang memiliki struktur logis tersendiri. Untuk memahami “teks sosial” tersebut maka

dibutuhkan interpretasi hermeneutis yang mencari interkoneksi epistemik di antara berbagai variabel yang ditentukan dari hasil membaca data “teks sosial” tersebut.

Rajutan interpretasi historis dan sosiologis terhadap suatu objek amatan dilakukan dengan metode *verstehen* (pemahaman). Melalui metode ini makna direkonstruksi dengan bantuan kategori-kategori pemikiran dan mencocokkan bersama-sama bermacam-macam potongan bukti untuk merekonstruksi makna yang dimaksud dari hasil bacaan teks sosial itu.<sup>5</sup>

## **HASIL dan PEMBAHASAN**

### **Revitalisasi Tradisi dan Pluralitas Sosial-Budaya**

Tidak banyak sumber sejarah yang dapat ditelusuri untuk menelisik ketegangan-ketegangan sosial antara “pendatang” dan “masyarakat lokal” di Kepulauan Maluku pada masa-masa prakolonial. Informasi mengenai berbagai aspek dari kawasan ini kebanyakan diperoleh dari catatan-catatan para pedagang dan/atau pejabat pemerintahan kolonial Eropa dan para misionaris yang datang bersama mereka. “*There are no extant indigenous sources from the sixteenth or the seventeenth centuries, and the only detailed foreign accounts are from the pens of*

---

<sup>5</sup> Josef Bleicher, *Hermeneutika Kontemporer* (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2003), hlm. 63.

*contemporary Portuguese, Spaniards, and Dutch,”* demikian catatan Andaya.<sup>6</sup>

Dari catatan-catatan mereka pula diperoleh gambaran mengenai interaksi para pedagang Nusantara dan masyarakat lokal Maluku, yang pada gilirannya membentuk karakter sosial yang hibrid dan sebagian telah menganut Islam, sementara sebagian lain masih mempraktikkan agama lokal – yang oleh Dieter Bartels disebut “Agama Nunusaku”.<sup>7</sup>

Benturan kepentingan politik-ekonomi justru terjadi sejak masa para pedagang Portugis melakukan aktivitas perdagangan rempah-rempah melalui perjanjian-perjanjian dagang dengan para elite lokal, baik di Utara (Ternate dan Tidore) maupun di Selatan (Ambon). Perjanjian-perjanjian dagang dengan melibatkan legitimasi politik tersebut kerap berujung pada pembagian keuntungan yang tidak sesuai dengan perjanjian sehingga menimbulkan hegemoni terutama dari pihak elite lokal. Selain itu, intrik-intrik politik dalam bentuk koalisi dan konfrontasi turut mempengaruhi

dinamika relasi politik-ekonomi antara masyarakat lokal dan Portugis.

Tersingkirnya Portugis dari Kepulauan Maluku oleh kedatangan *Vereenigde Oost-Indisch Compagnie* (VOC) tahun 1605 alih-alih meredakan ketegangan tersebut malah makin mengurangkan hegemoni masyarakat lokal. Keberpihakan pada Hitu dalam mengusir Portugis kini menjadi bumerang ketika VOC berhasrat memonopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku dan menghancurkan jaringan perdagangan tradisional antara masyarakat lokal dan para pedagang Nusantara yang telah terbentuk sebelumnya. Pada masa-masa ketika VOC menerapkan kebijakan monopoli perdagangan cengkeh, sebagian besar komunitas Islam Maluku terisolasi karena dibatasi ruang geraknya oleh VOC dan menolak untuk terlibat dalam urusan-urusan administrasi VOC.

Selama periode tersebut terjadi proses akomodasi Islam dan adat secara lebih intensif.<sup>8</sup> Penolakan terhadap sistem sekolah Belanda menjadikan sistem pembelajaran agama (Islam) secara tradisional di kampung-kampung Muslim sebagai model pendidikan utama yang penting. Ketidakpercayaan pada sistem administrasi VOC menjadikan sistem pemerintahan adat sebagai satu-satunya cara

---

<sup>6</sup> Leonard Y. Andaya, “Cultural State Formation in Eastern Indonesia” dalam Anthony Reid (ed.), *Southeast Asia in the Early Modern Era: trade, power, and belief* (Ithaca: Cornell University Press, 1993), hlm. 25.

<sup>7</sup> Dieter Bartels, *Guarding the Invisible Mountain: intervillage alliances, religious syncretism and ethnic identity among Ambonese Christians and Moslems in the Moluccas*. Dissertation: Cornell University 1977. Lihat juga Dieter Bartels, *Di Bawah Naungan Gunung Nunusaku: Muslim-Kristen Hidup Berdampingan di Maluku Tengah* Jilid I & II (Jakarta: Gramedia, 2017).

---

<sup>8</sup> Richard Chauvel, *Nationalists, Soldiers and Separatists: the Ambonese Islands from Colonialism to Revolt 1880-1950* (Leiden: KITLV Press, 1990), hlm. 161.

mengelola kehidupan sosial. Ini merupakan momentum historik revitalisasi tradisi (adat) dan agama sebagai dampak tekanan-tekanan politik dan ekonomi dari luar (VOC).

Proses yang berbeda berlangsung di komunitas-komunitas Sarane Ambon. Setelah tersingkir dari Hitu, Portugis diterima oleh kelompok komunitas Leitimor dan cukup berhasil menanamkan pengaruh politik dan agama (Katolik) di sana. Namun, hal itu tidak berlangsung lama setelah VOC berhasil merebut benteng Portugis di Ambon.

Konversi dari Katolik ke Protestan berlangsung begitu saja tanpa disertai upaya-upaya serius membina jemaat-jemaat Kristen di Leitimor karena kepentingan VOC lebih kepada perdagangan rempah-rempah. Meskipun banyak yang merasa dampak buruk dari kebijakan monopoli oleh VOC namun sebagian besar komunitas Sarane Ambon lebih memilih berafiliasi dengan Belanda.

Dalam hal ini faktor kesamaan identitas agama (Protestan) memainkan peran penting. Karena beragama Kristen, masyarakat lokal Leitimor lebih memilih berafiliasi dengan Belanda. Karena beragama Kristen, masyarakat lokal Leitimor punya akses lebih besar untuk direkrut menjadi pegawai rendahan administrasi kolonial VOC dan serdadu kolonial.

Dengan demikian, “Kristen” dan “Belanda” (modern) kemudian menjadi penanda identitas sosial yang tegas

membedakan komunitas Leitimor dengan komunitas Leihitu yang “Islam” dan “tradisional”. Afiliasi dan identifikasi dengan Belanda, melalui sistem sekolah Belanda dan Gereja, pada gilirannya meluruhkan dimensi-dimensi kebudayaan lokal pada komunitas Leitimor. Bahasa Melayu menggantikan bahasa tanah sebagai bahasa pengantar modern di sekolah-sekolah Belanda. Seperti disebutkan oleh Cooley,<sup>9</sup>

It was only through the process of Christianization and colonial rule that the indigenous language was generally wiped out amongst Ambonese Christians, the so-called Ambonese-Malay replacing it. This occurred as the result of a policy vigorously pursued by both State and Church under Dutch control.

Sistem pemerintahan adat direkonstruksi dengan menyisipkan konsep dan bentuk pemerintahan kolonial dengan menjadikan “raja” sebagai perpanjangan tangan pemerintah kolonial. Sementara pada sisi lain, institusionalisasi gereja merujuk pada model-model jemaat Belanda dengan pengorganisasian di bawah otoritas pemerintah kolonial. Inilah yang kemudian menciptakan ketegangan internal antara “raja” (otoritas negeri) dan “pendeta” (otoritas agama), yang secara ideologis membentuk dikotomi substansial “adat” dan “injil”; atau

---

<sup>9</sup> Frank L. Cooley, *Altar and Throne in Central Moluccan Societies*. Synopsis of his dissertation at Yale University 1961, hlm. 145.

yang disebut Cooley sebagai *functional dichotomy*.<sup>10</sup>

Traditionally they have tried to overcome this ambivalence and ambiguity by attempting a functional dichotomy between the realm of Caesar with its demands (adat), and the realm of God with its demands (monotheistic faith and ethics). But this has not removed the tension; hence conflict between congregation and Saniri, minister and radja, continues erupt over adat requirements.

Pesan Tobat GPM tahun 1960 dengan jelas memperlihatkan endapan ideologis tersebut.<sup>11</sup> Revitalisasi tradisi dalam komunitas Kristen Maluku sebenarnya berlangsung secara liminal dan ambigu. Keterasingan dari ranah kebudayaan lokal, terutama bahasa tanah, telah menggiring Kristianitas Maluku dalam proses pencarian identitas yang panjang dan belum usai. Periode sejarah pendudukan Jepang, yang singkat tapi signifikan, dan tiga dekade konstruksi “budaya seragam” oleh rezim Orde Baru, telah membentuk karakter budaya yang mengambang (*floating culture*), yang bergerak kemana-mana tanpa berpijak pada satu landasan identitas entah agama ataupun tradisi. Apa yang tampak kemudian adalah fragmen-fragmen agama dan adat yang

sebenarnya tidak padu tetapi dipaksakan menyatu sebagai penanda identitas berhadapan dengan liyan – yang oleh Frank Cooley disebut “Agama Ambon” – *the indigenized form of Christianity*.<sup>12</sup>

Kontestasi identitas budaya yang berlangsung terutama sejak masa kolonial juga turut mempengaruhi relasi-relasi kekuasaan berbasis identitas. Chauvell mencatatnya terutama pada masa-masa pergerakan nasional era 1940-an ketika kekuatan-kekuatan politik yang berporos pada gerakan nasionalisme republikan (Indonesia) vis-à-vis kekuatan-kekuatan politik tradisional berbasis otoritas budaya (adat) yang kukuh mempertahankan loyalitas pada pihak kolonial Belanda.

Dalam konteks itu, identitas agama dan etnis berkelindan membentuk modal sosial bagi eksistensi masing-masing kelompok dalam masyarakat Ambon (Maluku). Relasi-relasi kekuasaan berbasis identitas agama dan etnis ini berlangsung terus dalam dinamika sosial-budaya di Maluku, hingga memasuki era Indonesia modern di bawah administrasi rezim Orde Baru dengan pola kekuasaan yang sentralistik dan seragam.

Konstruksi “budaya seragam” oleh rezim Orde Baru juga turut menyebabkan terjadinya pergeseran-pergeseran signifikan

---

<sup>10</sup> Cooley, *Altar and Throne in Central Moluccan Societies*, hlm. 153.

<sup>11</sup> Saya beruntung sempat melakukan wawancara dengan Pdt. Dr. Nick Radjawane (alm.), salah seorang pelaku sejarah Pesan Tobat 1960, mengenai dinamika persidangan sinode yang melahirkan Pesan Tobat GPM itu, pada pertengahan tahun 2001.

---

<sup>12</sup> Cooley, *Altar and Throne in Central Moluccan Societies*, hlm. 153.

dalam komunitas-komunitas Salam Ambon. Akses yang lebih besar ke dalam birokrasi pemerintahan dan afiliasi dengan gerakan-gerakan Islam nasional Indonesia telah melahirkan bentuk-bentuk pemahaman politik dan interpretasi mutakhir mengenai identitas politik dan agama (Islam) di Maluku.

Relasi-relasi Salam-Sarane Ambon sejak masa kolonial dan terutama selama Orde Baru memperlihatkan pergulatan kontestasi identitas yang di dalamnya kebudayaan lokal (adat) dan agama (Islam/Kristen) dimaknai secara kontekstual. Pemaknaan tersebut tidak selalu bermuara pada kesalingpahaman (*mutual understanding*) tetapi kerap pula menuju pada persinggungan-persinggungan yang bergesekan panas.

Oleh karena itu, proses revitalisasi tradisi di Maluku sebenarnya merupakan sebuah proses kompleks dan rumit yang melibatkan banyak aktor dan campur-tangan negara. Ini sekaligus menjadi tantangan besar bagi agama-agama di Maluku untuk melakukan reinterpretasi ajarannya masing-masing dengan secara serius mempertimbangkan konteks sosial-politik-ekonomi pada tingkat lokal maupun nasional.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Steve Gaspersz, *Iman Tidak Pernah Amin: Menjadi Kristen dan Menjadi Indonesia* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2009), hlm. 80-85.

## **Otonomi Daerah dan Politik Identitas: Menggereja dalam Keragaman**

Ambruknya rezim Orde Baru melalui gerakan Reformasi 1998 telah membangkitkan harapan baru akan masa depan kehidupan bernegara yang lebih demokratis di Indonesia. Proses reformasi itu sendiri bukanlah proses-jadi-semalam. Hingga saat ini masyarakat Indonesia masih bergulat dengan kompleksitas masalah sebagai akibat terbukanya kran demokrasi dan pembenahan kapasitas sistem politik-ekonomi yang lebih fungsional bagi masyarakat Indonesia yang plural.

Dalam banyak hal masih terlihat ceruk kebijakan dan regulasi yang berpotensi menimbulkan perseteruan dan konflik sosial baik secara horizontal maupun vertikal; individual maupun komunal; malah memicu pula benturan antar-institusi negara (sipil maupun militer). Hiariej berargumen,<sup>14</sup>

Orde Baru sebaiknya dilihat sebagai formasi sosial kapitalis yang digerogoti dari dalam oleh kontradiksi internal yang diidapnya. Pengunduran diri Soeharto sebaiknya dipahami dalam kerangka kontradiksi internal ini, khususnya ketegangan dalam kapitalisme negara, perselisihan dalam kelas yang berkuasa dan konflik antara kelas-kelas dominan dan subordinan.

---

<sup>14</sup> Eric Hiariej, *Materialisme Sejarah Kejatuhan Soeharto: Pertumbuhan dan Kebangkrutan Kapitalisme Orde Baru* (Yogyakarta: IRE Press, 2005), hlm. 293.

Dampak utama dari kebangkitan demokratisasi pasca-1998 adalah tuntutan akan otonomi daerah. Suara-suara daerah bergaung dimana-mana menuntut kelonggaran dari negara untuk mengelola sumber daya masing-masing. Banyak daerah merasa dimiskinkan di tengah-tengah kekayaan alam mereka karena kebijakan sentralisme pembangunan Orde Baru yang terbukti jelas-jelas menciptakan ceruk dalam kesenjangan “pusat” dan “pinggiran”; “Jakarta” dan “daerah”.

Secara prinsipil, pemberlakuan otonomi daerah memberikan kesempatan bagi pemerintah dan masyarakat daerah untuk mengelola potensi lokalnya semaksimal mungkin bagi kepentingan kesejahteraan setempat. Namun, pada kenyataannya, implementasi otonomi daerah telah menciptakan ruang-ruang konflik yang baru, terutama dalam persoalan politik identitas. Sentralisme Orde Baru kini bergeser ke ekstrem yang lain: regionalisme. Jargon nasionalisme kini beralih menjadi semangat primordialisme dengan mengedepankan aspek-aspek identitas lokal dalam arena kontestasi kewarganegaraan (*citizenship*) Indonesia.<sup>15</sup> Agama dan tradisi lokal

kemudian berperan vital dalam menentukan arah pembangunan masyarakat Indonesia, yang tampak makin fragmentaristik dalam kategori-kategori sosial kontemporer.

Otonomi daerah sudah jelas bukan mekanisme sosial-politik-ekonomi yang sempurna. Salah satu isu penting yang berkembang sebagai dampaknya adalah makin terpetak-petaknya teritori suatu wilayah menurut konstruksi batasan-batasan sosial (*social boundaries*) yang tidak hanya melibatkan pertimbangan sumber daya tetapi juga identitas sosial yang lebih eksklusif. Jargon “Putra/Putri Daerah” dan “pendatang/orang asli” kian mengental dan mengeras sehingga tidak hanya menyebabkan kapling-kapling wilayah tetapi juga kapling-kapling identitas.

Kemajemukan sosial-budaya yang semasa Orde Baru dianggap sebagai ancaman yang berpotensi disintegrasi, melalui implementasi otonomi daerah kini perlahan tapi pasti menjadi karakter anti-kemajemukan dengan sekat-sekat identitas etnis dan agama yang berkelindan dengan kepentingan-kepentingan ekonomi-politik. Hal krusial di sini adalah terjadinya pergeseran signifikan relasi-relasi kekuasaan pada tingkat lokal dengan pola-pola klientelistik. Birokrasi pemerintahan menjadi arena kompetisi yang sengit, yang membuka celah penguatan sentimen-sentimen primordial (seagama, sesuku, sekampung, sekeluarga) sehingga

---

<sup>15</sup> Adam Tyson, *Decentralization and Adat Revivalism in Indonesia: the politics of becoming indigenous* (New York: Routledge, 2010); Rachmad E.D. Darmawan, *The Practices of Decentralization in Indonesia and Its Implication on Local Competitiveness*. School of Management and Government, University of Twente, Enschede, Netherlands 2008.

gesekan-gesekan kepentingan berpotensi menjadi konflik sosial.<sup>16</sup> Kondisi semacam ini turut membidani kelahiran *intermediate-class* – kelompok-kelompok yang berperan sebagai “broker” atau “calo” antara pihak pemerintah dan pengusaha yang mengeruk keuntungan dari kucuran dana pusat bagi pembangunan daerah/atau alokasi dana otonomi daerah serta praktik *rent-seeking*.<sup>17</sup>

Bukanlah berita baru baik di Maluku maupun daerah-daerah lain soal maraknya tuntutan otonomi daerah dan eksesnya yang berujung konflik antarkelompok pada tingkat lokal. Dalam konteks partikular GPM sebagai representasi Kristianitas di Maluku, saya melihat implementasi otonomi daerah sangat mempengaruhi dinamika pelayanan jemaat-jemaat. Klasis-klasis pelayanan GPM dibentuk berdasarkan pertimbangan kewilayahan pulau-pulau. Umumnya, dalam kerja sama dengan pemerintah setempat, satu klasis lebih sering berurusan dengan satu pemerintahan kabupaten.

Dengan begitu banyaknya pemekaran daerah, sebagai manifestasi semangat otonomi daerah, kini satu klasis harus berurusan dengan dua pemerintahan kabupaten karena sebagian jemaat berada di wilayah administrasi kabupaten A dan

sebagian lain di wilayah kabupaten B. Apakah pemekaran daerah (kabupaten) juga harus diikuti dengan pemekaran klasis GPM? Tentu tidak semudah yang dibayangkan. Namun demikian, berbagai konsekuensi pemekaran daerah tersebut sudah semestinya menjadi salah satu agenda pengembangan wilayah pelayanan GPM dengan risiko sosial-politik seminimal mungkin.

Pada konteks yang lebih luas, pemekaran daerah tingkat satu (provinsi) Maluku menjadi dua provinsi (Maluku dan Maluku Utara) tak pelak menimbulkan gesekan tersendiri dalam hubungan antara GPM dan GMIH. Hubungan yang semula diikat oleh kesepakatan saling memahami dan saling melengkapi antara dua organisasi gerejawi ini kini kerap diwarnai ketegangan-ketegangan horizontal berdasarkan klaim-klaim kewilayahan dan otoritas sinodal berbasis teritori – Maluku Utara / Halmahera adalah wilayah pelayanan GMIH dan Maluku adalah wilayah pelayanan GPM.

Selain itu, pengentalan dan pengerasan identitas sebagai efek otonomi daerah akan menjadi tantangan terbesar bagi GPM dalam menjaga keutuhan wilayah maupun soliditas sosial jemaat-jemaatnya. Dalam konteks sosial yang makin terfragmentasi semacam itu jemaat-jemaat GPM, dan juga masyarakat lainnya secara luas, sangat rentan terjerumus dalam singgungan-singgungan politik identitas (etnis

---

<sup>16</sup> Henk Schulte Nordholt & Gerry van Klinken (eds.), *Renegotiating Boundaries: Local Politics in Post-Suharto Indonesia* (Leiden: KITLV Press, 2007).

<sup>17</sup> Gerry van Klinken, *Perang Kota Kecil: Kekerasan Komunal dan Demokratisasi di Indonesia* (Jakarta: KITLV Press, 2007), hlm. 79-82.

dan agama). Belum lagi jika konsekuensi pemekaran daerah tersebut berpeluang bagi mengalirnya kelompok-kelompok etnis lain yang masuk dengan berbagai kepentingan (terutama ekonomi).<sup>18</sup>

Isu penting mengenai relasi antara “pendatang” dan “orang asli” sebenarnya bukan pada penolakan arbitrer kedatangan “orang luar” melainkan pada orientasi pembangunan yang tidak berkeadilan dan condong pada pengabaian keseimbangan relasional melalui pembiaran proses-proses marjinalisasi masyarakat lokal.

Ketidakseimbangan relasional tersebut mewujud dalam bentuk-bentuk produk regulasi yang tidak menghargai hak-hak hidup masyarakat lokal, komposisi pemerintahan yang lebih berorientasi dominasi ekonomi melalui politik demografi, dan proliferasi sentimen keagamaan untuk meraih kepentingan politik-ekonomi sesaat. Dalam konteks itu maka kebijakan transmigrasi (dari Jawa ke Maluku) oleh pemerintah pusat mesti disikapi dengan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan sosial dan kemanusiaan yang adil dan beradab, serta tidak semata-mata pertimbangan teknis demografis untuk mengurai densitas penduduk di Pulau Jawa.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Hatib Kadir, “Migrant Traders in the Marketplaces (*Pasar*) and their Domination in the Post-conflict Society of the Moluccas Province, Indonesia”. *The Asia Pacific Journal of Anthropology* (2019): 1-16.

<sup>19</sup> Lih. Yunus Ukru, Erwin Panjaitan & Roem Topatimasang (eds.), *Potret Orang-orang Kalah:*

## **GPM dan Masa Depan Keberagaman di Indonesia**

Sejak menjadi gereja mandiri, terlepas dari ikatan formal dengan gereja induk Belanda, pada tahun 1935 hingga kini, GPM masih akan terus berhadapan dengan isu-isu utama seputar agama dan masyarakat. Isu-isu tersebut tidak dapat semata-mata dihadapi dan disikapi dengan pendekatan teologis tetapi lebih jauh diperlukan kajian komprehensif mengenai realitas sosial, politik, ekonomi, kebudayaan dan pendidikan, yang secara langsung memiliki hubungan kausalitas dengan dinamika pengorganisasian gereja dan karakteristiknya sebagai organisasi keagamaan yang berbasis pada ranah kebudayaan masyarakat kepulauan dalam entitas geopolitik Republik Indonesia. Di antara beberapa isu, saya hendak fokus pada isu “stigmatisasi separatisme RMS” dan “reinterpretasi kearifan lokal dalam perspektif kemanusiaan universal”.

### ***Stigmatisasi Separatisme RMS***

Peristiwa Proklamasi Republik Maluku Selatan (RMS) pada 25 April 1950 tidak dapat dilihat sebagai peristiwa tunggal. Peristiwa tersebut mesti dilihat dalam spektrum konteks sosial-politik lebih luas yang melibatkan dimensi-dimensi kontekstual

---

*Kumpulan Kasus Penyingkiran Orang-orang Asli Kepulauan Maluku. Hasil Pengamatan Lapangan tanggal 13 April – 10 Mei 1993.*

pada tingkat lokal, nasional maupun pertarungan kekuasaan global (internasional). Namun demikian, dipatahkannya pemberontakan RMS melalui infiltrasi bersenjata tentara Indonesia pada Desember 1950 ternyata meninggalkan guratan memori kolektif yang dikonstruksi secara arbitrer oleh kekuasaan negara sebagai “hantu” yang terus-menerus patut dicurigai dan dikontrol melalui pendekatan keamanan.

Sejak gagalnya pemberontakan RMS tahun 1950, yang kemudian diikuti oleh penangkapan tokoh-tokoh kuncinya, sementara sebagian lain mencari jalan ke luar negeri (terutama Belanda), RMS menjadi stigma politik yang mendiskreditkan rakyat Maluku. Hampir sepanjang kekuasaan rezim Orde Baru, setiap tanggal 25 April Kota Ambon dan pulau-pulau Lease dipenuhi pasukan polisi dan tentara dengan kecurigaan bahwa tanggal tersebut memicu sentimen separatisme di Maluku. Penanganan kasus-kasus yang diklaim sebagai “aksi separatisme” pun tidak pernah tuntas ditangani sehingga “hantu” RMS ini dibiarkan terus bergentayangan serta menjadi alasan bagi pihak kepolisian dan militer menciduk siapa saja yang dianggap mencurigakan.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Ada kritik terhadap ketidakadilan hukum berkaitan dengan kasus-kasus yang dicap “separatisme” oleh pihak pemerintah, seperti penangangan kasus tarian Cakalele di hadapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat acara Hari Keluarga Nasional (Harganas) di Ambon yang dengan segera diciduk dan

Eksistensi RMS secara historis mesti ditempatkan secara proporsional dalam konteks pergolakan politik lokal. Entitas ini tidak dapat dilihat secara sederhana hanya sebatas “gerakan separatis” karena negara Indonesia itu sendiri pada waktu itu (1950) belum mewujud sebagai sebuah entitas politik yang mumpuni dengan kekuasaan negara yang kuat terpusat.<sup>21</sup>

Label “RMS” juga dipasang sebagai strategi untuk menghambat karir atau menyingkirkan orang-orang tertentu dari posisi birokrasi hanya karena alasan kakek-neneknya atau bapak-ibunya atau paman-bibinya terlibat peristiwa RMS 1950. Itu juga yang menjadi alasan untuk menggeser posisi orang-orang tertentu dan menggantikannya dengan orang-orang yang dianggap “bersih lingkungan” oleh negara (Orde Baru). Salah satu fase eskalasi konflik sosial di Maluku 1999-2005 – pasca Orde Baru – juga memunculkan isu separatisme RMS yang

---

dijatuhi hukuman dengan pasal “makar” dan “pelecehan kepala negara”. Tindakan hukum itu berbanding terbalik dalam kasus-kasus kekerasan dan pelecehan “presiden” sebagai simbol negara, seperti yang dilakukan oleh pemimpin salah satu ormas berlabel agama yang menyebut “SBY Pecundang”. Lihat <http://nasional.tempo.co/read/news/2008/04/04/058120451/penari-cakalele-harganas-divonis-seumur-hidup> dan <http://www.tribunnews.com/nasional/2013/07/24/ruhut-sitompul-minta-polisi-tangkap-habib-rizieq>. Dibaca tanggal 3 November 2020.

<sup>21</sup> Steve Gaspersz, “Epilog: Menjadi Indonesia: Sebuah Pencarian” dalam John Ruhullessin, *Mencari Cita Kemanusiaan Bersama: Pergulatan Keambonan dan Keindonesiaan* (Salatiga: Satya Wacana University Press, 2016).

dilekatkan sebagai ideologi Kristen untuk melepaskan diri dari Republik Indonesia. Dengan demikian, ideologi RMS dan politik agama (Kristen) diasumsikan sebagai satu kesatuan, antara lain melalui plesetan “Republik Maluku Sarane”.

Chauvel sendiri dalam kajiannya yang komprehensif menyatakan patut diakui bahwa kontestasi identitas agama turut berperan dalam peristiwa tersebut, tetapi juga harus dilanjutkan pada temuan dan analisis bahwa motivasi mendasar gerakan separatisme tersebut lebih bersifat politis-regional ketimbang agama, serta melibatkan kompleksitas isu-isu lokal, nasional dan internasional saat itu.<sup>22</sup>

Kenyataan ini memperlihatkan bahwa proses membangun kesadaran sejarah mengalami stagnasi total terutama pada ruang-ruang pendidikan formal (sekolah). Sejarah RMS menjadi sejarah bisu yang hanya dikonstruksi oleh negara sesuai kepentingan politiknya sehingga meninggalkan residu ambiguitas bagi kaum Muda Maluku untuk cerdas membaca sejarah lokalnya sendiri dan bagaimana relasi-relasi persaudaraan dengan orang-orang Maluku di

---

<sup>22</sup> Kajian sejarah politik Richard Chauvel penting diperhatikan untuk memahami pertautan dan persilangan identitas dalam dinamika politik lokal, nasional, regional dan internasional di kepulauan Maluku sejak masa kolonial hingga era pergerakan nasional dan bangkitnya “nasionalisme” Ambon vis-à-vis kaum republikan Indonesia yang berporos di Pulau Jawa. Richard Chauvel, *Nationalists, Soldiers and Separatists: the Ambonese Islands from Colonialism to Revolt 1880-1950* (Leiden: KITLV Press, 1990).

Belanda sering berpengaruh pada karir dan kehidupan orang-orang Maluku di Maluku (Indonesia).

Dalam konteks ini, GPM patut memberi perhatian serius bagi pendidikan sejarah politik lokal sebagai proses penguatan karakter menggereja vis-à-vis konstruksi ideologis negara dengan seluruh kepentingannya untuk terus-menerus menghidupkan “hantu” RMS. Selain itu, diskusi terbuka dengan semua pihak yang turut “memainkan” kartu RMS ini untuk kepentingan politik mereka sendiri juga perlu dilakukan agar polemik politik menjadi pembelajaran publik yang turut menentukan orientasi dan sikap politik GPM sebagai gereja bagi kemanusiaan universal, bukan bagi kepentingan primordial partikular. Tentang hal itu, temuan Turner patut diperhatikan,<sup>23</sup>

Thus, the change from riot to nationalist conflict was specifically facilitated by the access to these earlier myths of ‘us’ and ‘them’ and the confrontation of two ideological nationalism in which each responded to each other’s changing ideological depictions of themselves and their enemy. As 6.2 will show, just prior to the emergence of the *Laskar Jihad*, people in Ambon were constructing the conflict and their enemies on the basis of the nascent dynamics of the conflict at the time including socio-economic grievances of perceived bias in the public service against Muslims and higher

---

<sup>23</sup> Kathleen T. Turner, *Competing Myths of Nationalist Identity: Ideological Perceptions of Conflict in Ambon, Indonesia*. Dissertation: Murdoch University 2006, hlm. 191.

unemployment among certain sections of the Muslim community. This left a significant role to the *Laskar Jihad* to galvanise local Muslims through a unifying ideology based on a systematic ideological depiction of a Christian conspiracy against Indonesian/Islamic autonomy.

### ***Reinterpretasi Kearifan Lokal dalam Perspektif Kemanusiaan Universal***

Ikatan-ikatan kultural *Pela* dan *Gandong* di Maluku pernah menjadi ikon “kerukunan umat beragama” di Indonesia. Namun, kebanggaan itu tidak disertai oleh pemahaman mendalam mengenai proses penggerusan kebudayaan lokal melalui implementasi regulasi negara seperti Undang-Undang No. 5 tahun 1979 mengenai pemerintah desa. *Pela* dan *Gandong* bukanlah produk kebudayaan yang bergerak di ruang hampa. Implementasi UU tersebut secara sistematis telah meluruhkan spirit kearifan lokal yang melanggerakkan tradisi *Pela* dan *Gandong*.

Penyeragaman struktur birokrasi dan sistem pemerintahan daerah dari tingkat provinsi hingga desa selama lebih tiga dekade sebenarnya telah mematikan spirit kearifan lokal *Pela* dan *Gandong* sehingga hanya menjadi bentuk-bentuk kebudayaan tanpa “roh” yang dibangun di atas kesadaran sejarah dan kebudayaan secara matang. Hampir seluruh ekspresi kebudayaan lokal pada

gilirannya tereduksi menjadi ritual-ritual eksotik tapi miskin estetik dan hermeneutik.<sup>24</sup>

Konflik sosial 1999-2005 yang bersamaan dengan momentum keterbukaan dan demokratisasi pasca Reformasi 1998 menjadi ranah subur tumbuhnya kesadaran kultural-primordial (etnis dan agama) untuk menemukan kembali keragaman identitas sosial-budaya yang dimiskinkan oleh proses penyeragaman/dominasi budaya selama Orde Baru. Revitalisasi tradisi berkembang secara massif di berbagai daerah disertai dinamika politik lokal yang mencoba mengukuhkan determinasinya bagi kemandirian lokal dan regional.

Jika sebelumnya pada Orde Baru ketegangan terjadi akibat ketimpangan proses pembangunan pusat-daerah, kini berbagai daerah melegitimasi dirinya melalui pemekaran daerah (otonomi daerah) sebagai pusat-pusat baru yang atas nama rakyat lokal mengatur daerahnya dengan makin mengabaikan tingkat keragaman masyarakat lokal. Bentuk “penyeragaman” baru muncul melalui sekat-sekat identitas “anak daerah” dan politik primordial klientelisme.

---

<sup>24</sup> Dalam beberapa aspek Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa telah memperlihatkan transformasi gagasan dan konsep yang lebih terbuka dan kontekstual dibandingkan undang-undang sebelumnya. Namun demikian, tetap tampak kecenderungan untuk menggunakan *platform* kelompok dominan dalam mendefinisikan sistem pemerintahan desa. Salah satu isu krusial pada tingkat praksis adalah bagaimana revivalisme tradisi lokal dan regulasi berbasis otonomi daerah dikombinasikan dengan implementasi UU ini.

Dalam konteks sedemikian, GPM punya peran penting dalam mendorong proses reinterpretasi kearifan lokal dalam perspektif kemanusiaan universal. Malah, Bartels mencatat:<sup>25</sup>

“Ohorella (1999), seorang ahli Islam, menginginkan konsep *pela-gandong* yang dimodernisasi dan diformalkan sehingga menjadi “gaya baru” untuk membenahi hubungan Muslim-Kristen... untuk memperluas *pela* ke luar desa dengan cara pertama-tama membentuk persekutuan yang terdiri dari seluruh desa dalam satu kecamatan, dan kemudian memperluasnya dengan membentuk sistem persekutuan antara berbagai kecamatan dalam satu provinsi.”

Dengan perkataan lain, ikatan-ikatan *Pela* dan *Gandong* yang pada hakikatnya berbasis ikatan primordial (keluarga dan antarkampung) kini perlu dimaknai lebih luas dengan mempertimbangkan tingkat kemajemukan masyarakat sebagai akibat terbukanya kran demokratisasi dan makin membesarnya efek globalisasi karena perkembangan teknologi informasi-komunikasi.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Dieter Bartels, “Kebangkitan Adat dan Lembaga Kolonial dalam Penyelesaian Kerusuhan antara Kelompok Muslim dan Kelompok Kristen di Ambon” dalam Martin Ramstedt & Fadjjar Ibnu Thufail (eds.), *Kegalauan Identitas: Agama, Etnisitas, Kewarganegaraan pada Masa Pasca-Orde Baru* (Jakarta: Gramedia, 2011), hlm. 119-148.

<sup>26</sup> Dengan teknologi internet, perluasan pertukaran informasi baik yang positif maupun provokatif merambah dalam bentuk-bentuk virtual. Ini dapat dilihat dalam penelitian Birgit Brauchler, “Cyberidentities at War: Religion, Identity, and the Internet in the Moluccan Conflict”. *INDONESIA* 75 (April 2003): hlm. 123-151.

Pertanyaan penting di sini adalah: Bagaimana kearifan lokal Maluku mampu menjadi modal sosial dan modal budaya untuk membangun masyarakat yang plural ini? Realitas kemajemukan Maluku sudah ada sejak dulu – bahkan Gerrit Knaap menyebut Ambon sebagai *the city of migrants* – namun realitas kemajemukan itu belum pernah dipahami dalam konteks entitas geopolitik negara kontemporer seperti Republik Indonesia.<sup>27</sup> Jika dalam perjalanan pelayanannya realitas kemajemukan sosial-budaya ini menjadi salah satu isu penting maka GPM semestinya menempatkannya sebagai agenda utama gerak misiologis dan orientasi teologisnya pada abad ke-21 ini.

Dengan semua catatan itu, saya berargumen bahwa [1] revitalisasi tradisi merupakan salah satu model gerakan sosial pascakolonial yang menentang kecenderungan paradigma sentralisasi pembangunan yang bertumpu pada ideologi pertumbuhan ekonomi atau kapitalisme berporos di negara-negara industri maju. Model ini merupakan dekonstruksi pemahaman dan praksis “modernitas” yang bergerak linear dan konvensional: dari tradisional ke modern (imitasi “Barat”), dan lebih bertumpu pada paradigma *multiple modernities*. Artinya, modernitas bukanlah hasil proses modernisasi yang berjalan satu

---

<sup>27</sup> Gerrit J. Knaap, “A City of Migrants: Kota Ambon at the end of the seventeenth century”. *INDONESIA* 51 (April 1991): hlm. 105-128.

arah dan tunggal tetapi dalam wujud bervariasi;<sup>28</sup>

[2] Peran politik dan kebudayaan gereja (GPM) seyogyanya bergerak dua arah antara realitas empirik (kajian konteks secara kritis dan terukur) dan proses abstraksi (kajian tekstual dan hermeneutik) sehingga gereja bukan sekadar institusi moral tetapi agen perubahan sosial dengan visi keduniawian yang serius mempertimbangkan kemanusiaan dan lingkungan hidup semesta.

Dengan demikian, teologi gereja (GPM) bukanlah semata-mata konsep yang diekstraksi dari penafsiran teks-teks suci melainkan pendalaman kritis-analitis dan reflektif terhadap realitas kemanusiaan dengan seluruh kompleksitasnya. Di situlah tugas berteologi (*doing theology*) menjadi rumit, melelahkan sekaligus menggairahkan karena selalu mengikuti arah perkembangan kehidupan sosial masyarakat yang menjadi akar refleksi sosial-teologisnya.<sup>29</sup>

## SIMPULAN

Artikel ini merupakan upaya merekonstruksi sejarah ringkas suatu gereja sebagai institusi

keagamaan yang bergulat dengan pemaknaan identitasnya dalam konteks sosial-budaya partikular. Dialektika antara makna ideal yang termanifestasi dalam nilai-nilai ajaran agama (Kristen) yang terbentuk dalam konteks kolonial diperhadapkan dengan realitas konteks sosial-budaya yang khas.

Pemaknaan identitasnya tersebut dideterminasi dengan sangat kuat oleh perjumpaan-perjumpaan dengan identitas liyan. Perjumpaan dialektis tersebut melahirkan cara pandang dan gaya hidup yang lebih kontekstual dibandingkan dengan saat nilai-nilai kristiani itu diterima dalam kemasan ideologi dan teologi Barat. Dengan demikian, institusi keagamaan seperti GPM pada hakikatnya terus-menerus melakukan kontekstualisasi nilai-nilai kristiani dan merekonstruksi identitasnya secara relasional dengan liyan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qurtuby, Sumanto. (2016). *Religious Violence and Conciliation in Indonesia: Christians and Muslims in the Moluccas*. New York: Routledge.
- Andaya, Leonard. (1993). *The World of Maluku*. Honolulu: University of Hawaii.
- Bartels, Dieter. (1977). *Guarding the Invisible Mountain: intervillage alliances, religious syncretism and ethnic identity among Ambonese Christians and Moslems in the Moluccas*. Dissertation: Cornell University.
- Bartels, Dieter. (2017). *Di Bawah Naungan Gunung Nunusaku: Muslim-Kristen*

---

<sup>28</sup> Volker Gottowik (ed.), *Dynamics of Religion in Southeast Asia: Magic and Modernity* (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2014), hlm. 12. "Against conventional convictions, which emphasize the primacy of the economic system as the substructure of society, the conception of multiple modernities highlights the cultural dimensions of modernity and its locality specific characteristic."

<sup>29</sup> Steve Gaspersz, *Batu Karang Yang Teguh: Eklesiologi dan Teologi Publik Timur Indonesia* (Mimika: Penerbit Aseni, 2020).

- Hidup Berdampingan di Maluku Tengah*. Jilid I & II. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Bleicher, Josef. (2003). *Hermeneutika Kontemporer*. Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru.
- Brauchler, Birgit. (2003). Cyberidentities at War: Religion, Identity, and the Internet in the Moluccan Conflict. *INDONESIA* 75 (April 2003): 123-151.
- Chauvel, Richard. (1990). *Nationalists, Soldiers and Separatists: the Ambonese Islands from Colonialism to Revolt 1880-1950*. Leiden: KITLV Press.
- Cooley, Frank L. (1961). *Altar and Throne in Central Moluccan Societies: a study of the relationship between the institutions of religion and the institution of local government in a traditional society undergoing rapid social change*. Dissertation: Yale University.
- Reid, Anthony (ed.). (1993). *Southeast Asia in the Early Modern Era: trade, power, and belief*. Ithaca: Cornell University Press.
- Darmawan, Rachmad E. D. (2008). *The Practices of Decentralization in Indonesia and Its Implication on Local Competitiveness*. Enschede: University of Twente.
- Gaspersz, Steve. (2009). *Iman Tidak Pernah Amin: Menjadi Kristen dan Menjadi Indonesia*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Gaspersz, Steve. (2020). *Batu Karang Yang Teguh: Eklesiologi dan Teologi Publik Timur Indonesia*. Mimika: Penerbit Aseni.
- Gottowik, Volker (ed.). (2014). *Dynamics of Religion in Southeast Asia: Magic and Modernity*. Amsterdam: Amsterdam University Press.
- Hiariej, Eric. (2005). *Materialisme Sejarah Kejatuhan Soeharto: Pertumbuhan dan Kebangkrutan Kapitalisme Orde Baru*. Yogyakarta: IRE Press.
- Kadir, Hatib. (2019). Migrant Traders in the Marketplaces (*Pasar*) and their Domination in the Post-conflict Society of the Moluccas Province, Indonesia. *The Asia Pacific Journal of Anthropology* (2019): 1-16.
- Knaap, Gerrit J. (1991). A City of Migrants: Kota Ambon at the end of the seventeenth century. *INDONESIA* 51 (April 1991): 105-128.
- Nordholt, Henk Schulte & van Klinken, Gerry (eds.). (2007). *Renegotiating Boundaries: Local Politics in Post-Suharto Indonesia*. Leiden: KITLV Press.
- Ramstedt, Martin & Thufail, Fadjar Ibnu (eds.). (2011). *Kegalauan Identitas: Agama, Etnisitas, Kewarganegaraan pada Masa Pasca-Orde Baru*. Jakarta: Gramedia.
- Reid, Anthony (ed.). (1993). *Southeast Asia in the Early Modern Era: trade, power, and belief*. Ithaca: Cornell University Press.
- Ruhullessin, John. (2005). *Etika Publik: Menggali dari Tradisi Pela di Maluku*. Salatiga: Satya Wacana University Press.
- Ruhullessin, John. (2016). *Mencari Cita Kemanusiaan Bersama: Pergulatan Keambonan dan Keindonesiaan*. Salatiga: Satya Wacana University Press.
- Triyono, Lambang dkk (eds.). (2004). *Potret Retak Nusantara: Studi Kasus Konflik di Indonesia*. Yogyakarta: CSPA UGM.
- Turner, Kathleen T. (2006). *Competing Myths of Nationalist Identity: Ideological Perceptions of Conflict in Ambon, Indonesia*. Dissertation: Murdoch University.
- Tyson, Adam. (2010). *Decentralization and Adat Revivalism in Indonesia: the politics of becoming indigenous*. New York: Routledge.

Ukru, Yunus, Erwin Panjaitan & Roem Topatimasang (eds.). (1993). *Potret Orang-orang Kalah: Kumpulan Kasus Penyingkiran Orang-orang Asli Kepulauan Maluku*. Hasil Pengamatan Lapangan tanggal 13 April – 10 Mei 1993.

Van Klinken, Gerry. (2007). *Perang Kota Kecil: Kekerasan Komunal dan Demokratisasi di Indonesia*. Jakarta: KITLV Press